

DAFTAR PUSTAKA

- Afolabi, A., dkk. (2022). E-procurement and public sector efficiency: Streamlining business processes and reducing administrative burden.
- Ahmad, A., Adys, A. K., & Haq, N. (2020). *Implementasi e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar*. Jurnal Administrasi Publik.
- ANTARA News. (2024, 10 Desember). *LKPP: E-katalog versi 6.0 tingkatkan efisiensi transaksi pengadaan*. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4522402/lkpp-e-katalog-versi-60-tingkatkan-efisiensi-transaksi-pengadaan>
- Fernando, F., dkk. (2020). Model efektivitas dan efisiensi e-procurement serta dampaknya terhadap kepuasan pengguna di Provinsi Maluku. *Jurnal Maneksi*, 9(2), 123–135.
- Francesco, I. M., & Hastuti, H. (2022). The effect of e-procurement implementation and government internal control system against fraud prevention of government procurement of goods/services (Survey of procurement officials in Cimahi City). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 237–243.
- Heeks, R. (2003). *Most eGovernment-for-development projects fail: How can risks be reduced?* (iGovernment Working Paper Series No. 14). Institute for Development Policy and Management, University of Manchester. <http://idpm.man.ac.uk/publications/wp/igov/index.shtml>
- Indrajit, R. (2016). *E-government: Konsep, kebijakan, dan implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Islamia, I., dkk. (2025). Efektivitas pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-katalog di Kabupaten Sinjai. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, 7(1), 45–60.
- Juliyanti, W., & Ditasari, R. A. (2025). *Does e-government maturity enhance transparency and public accountability in local government finance? (An*

- empirical study on regency governments in Indonesia 2020–2022*). Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah (JESYA), 8(2).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2023). *Efisiensi*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020). *Pedoman implementasi e-procurement melalui LPSE dan e-katalog*. Jakarta: Kementerian PANRB.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025, August 20). *KPK dorong ekosistem pengadaan barang/jasa berintegritas lewat pelatihan antikorupsi*. Anti-Corruption Learning Center (ACLC KPK).
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: LKPP.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2022). *Laporan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah*. Jakarta: LKPP.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2021). *Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik*.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.
- Mu'ah, Masram, Amalia, W., Sayyid, M., & Mas'adah. (2024). Pengaruh implementasi e-procurement terhadap fraud pengadaan barang dan jasa dalam mewujudkan good governance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1810–1821.
<https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2065>
- Muharram, M., dkk. (2025). Efisiensi dan efektivitas pengadaan barang/jasa (e-procurement) pada LPSE dan e-katalog di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. *JAFM: Journal of Accounting and Finance Management*, 4(1), 15–30.

- Musri, M., Pasaribu, F. R., Khudri, N., Ariyati, Y., & Rahman, Y. (2024). *Implementasi e-government dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi negara*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 7(3), 8888–8890.
- Nasrullah, R. (2024). *Digitalisasi pemerintahan dan transformasi pelayanan publik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2016). *Preventing corruption in public procurement*. Paris: OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). *[Definisi dan kebijakan e-procurement]*.
- Panggalo, A., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Analisis kinerja pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo: Peran sistem LPSE dalam meningkatkan proses pengadaan. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 70–78. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/70>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- Sari, R., & Triandi, T. (2016). Pengaruh penggunaan e-procurement terhadap efektivitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 1–12.
- Sari, R. P., & Nugroho, A. (2021). Peran layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dalam mewujudkan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 45–56.
- Setyadiharja, R., Budiman, S., Karim, Z. A., Matridi, R. A., Junriana, J., Ferizone, F., & Nurmandi, A. (2014). E-procurement system technology: An analysis in electronic procurement service unit (LPSE) of Kepulauan Riau Province. *The Asian Journal of Technology Management*, 7(2), 93–107.
- Suri, S., dkk. (2023). Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) pada Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 12(2), 89–104.
- Supawanhar, Romdana, Pratama, R. A., & Purnamasari, M. (2022). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan publik: Meningkatkan integritas dan efisiensi. *SENGKUNI Journal: Social Sciences and Humanities*, 3(2), 67–72.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025). *Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Vaidya, K., Sajeev, A. S., & Callender, G. (2019). E-procurement adoption in government organizations: Benefits and challenges. *International Journal of Public Sector Management*, 32(1), 34–52.
<https://doi.org/10.1108/IJPSM-03-2018-0070>
- World Bank. (2009). *Information and communications for development 2009: Extending reach and increasing impact*. Washington, DC: World Bank.
<https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7605-8>
- Yatiningrum, Y., & Tyas, A. (2022). Pengaruh implementasi e-procurement dan akuntabilitas terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa pada Dinas

Perhubungan Kabupaten Probolinggo. *Jesya: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(2), 978–989.

Yufendra, Y., Handayani, A., Perwira, R. D., & Barusman, A. R. (2023). *Factors influencing the success of electronic-based government policy implementation*. Proceedings of ICOMLOS.